

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1982).

Abbas, Syahrizal, Mediasi dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2011).

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004

Amriani, Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, (Grafindo Persada: Jakarta, 2012).

Busro, Achmad, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2011).

Chomzah, Ali Achmad, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat dan Permasalahannya, (Jakarta : Presatsi Pustaka, 2002).

Edi As'adi, Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Fuady, Munir, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Goodpaster, Garry, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, (Jakarta: ELIPS Project, 1993).

Harahap, M Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009).

Jamilah, Fitrotin, Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Jakarta: Buku Seru, 2014).

Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, (Jakarta : Aditama, 2004).

Kamilah, Anita, Bangun Guna Serah (BOT) Membangun tanpa harus memiliki tanah (perspektif hukum agrarian, hukum perjanjian dan hukum public, (Bandung: Keni Media, 2013).

Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Margono, Suyud, ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005).

Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Moore, Christopher W., Mediasi Lingkungan, (Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law dan CDR Associates, 1995).

Nugroho, Susanti Adi, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, (Prenada Media: Jakarta, 2009).

Patrik, Purwahid, Dasar-dasar Hukum Perikatan, (Bandung: Mandar Maju, 1994).

Rahmadi, Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Rajawali Pers: Jakarta, 2011).

Salim, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Santoso, Budi, Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur Model BOT (Build Operation and Transfer), (Solo: Genta Press, 2008).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Press, 1985).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986).

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa 1987).

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).

Syaifuddin, M., Hukum Kontrak, Memahami Kontral Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), (Bandung: Mandar Maju, 2012)

Usman, Rachmadi, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

Widnyana, I Made, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (PT.Fikahati Aneska: Jakarta, 2009)

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara-Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1991 tentang Keputusan Presiden Tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri.

Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Infrastruktur.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005.

Keputusan Menteri Keuangan No. 234/KMK-04/1995.

SK Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (“Build Operate and Transfer”).

Bappenas, RPJMN 2010-2014.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademis Peraturan perundangundangan tentang Perjanjian BOT* (Jakarta, 1997).

Menteri Negara Pembangunan Nasional RI, 2002.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016

Makalah

Adillah, Siti Ummu, Kontruksi Hukum Perjanjian Build Operate Tranfers (BOT) Sebagai Alternate Pembiayaan Proyek, Jurnal Hukum, Vol. XIV, No. I, April 2004.

Amirah, Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said, Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba, (Jurnal Pasca Unhas,) sumber: <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/a15c5f83b24f7562db904bf1b9db7613.pdf>

Mahkamah Agung, Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, 2008.

Levy, Sidney M, Build, Operate, Transfer: Paving the Way for Tomorrow's Infrastructure (John Willey and Sons 1996).

Saliba, Aziz T., Comparative Law Europe, (contracts and Legislation), Universidade de Itauna dan Faculdades de Direito do Oeste de Minas, Brasil, (Vol 8, nomor 3, September 2001), dalam <http://pihlawyers.com/blog/?p>

Sidharta, Arief B., Revisi Pemikiran Soediman Kartohadiprodjo tentang Pancasila Berkaitan Dengan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Dies Natalis ke-51 Fakultas Hukum UNPAR, (Bandung: 2009).

Purwanto, Harry, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional, (Mimbar Hukum Vol 21, Nomor 1, Februari 2009).

Soleh, Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Umum dengan Kontrak Bangun Serah Guna / Build Operate Transfer (Bot) Di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, UNDIP (Semarang : 2010).

Sumardjono, Maria S.W., Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 14 Februari 1998.

UNIDO, Guidelines for Infrastructure Development Through Build Operate Transfer (BOT) Projects (Vienna: UNIDO, 1996).

Wibowo, Basuki Rekso, Menyelesaikan Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Pidato), Disampaikan pada pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 17 Desember 2005

Internet

<https://www.innagroup.co.id/home> . Di akses pada 01 Maret 2019

<https://id.linkedin.com/company/pt-grand-indonesia> . Di akses pada 01 maret 2019

<http://arsip.gatra.com/2016-0305/majalah/artikel.php?pil=23&id=161462>. Diakses pada 01 maret 2019

<https://yukk.co.id/blog/yang-perlu-kamu-ketahui-tentang-grand-indonesia-shopping-town.html>. Di akses pada tanggal 05 maret 2019

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/03/06/juniver-tidak-ada-korupsi-digrand-indonesia>. Diakses pada tanggal 10 April

<http://arsip.gatra.com/20160215/majalah/artikel.php?pil=23&id=161361> diakses pada 11 April 2019

<https://nasional.kontan.co.id/news/kejagung-hentikan-penyidikan-kasus-grand-indonesia> diakses pada 8 Juni 2019